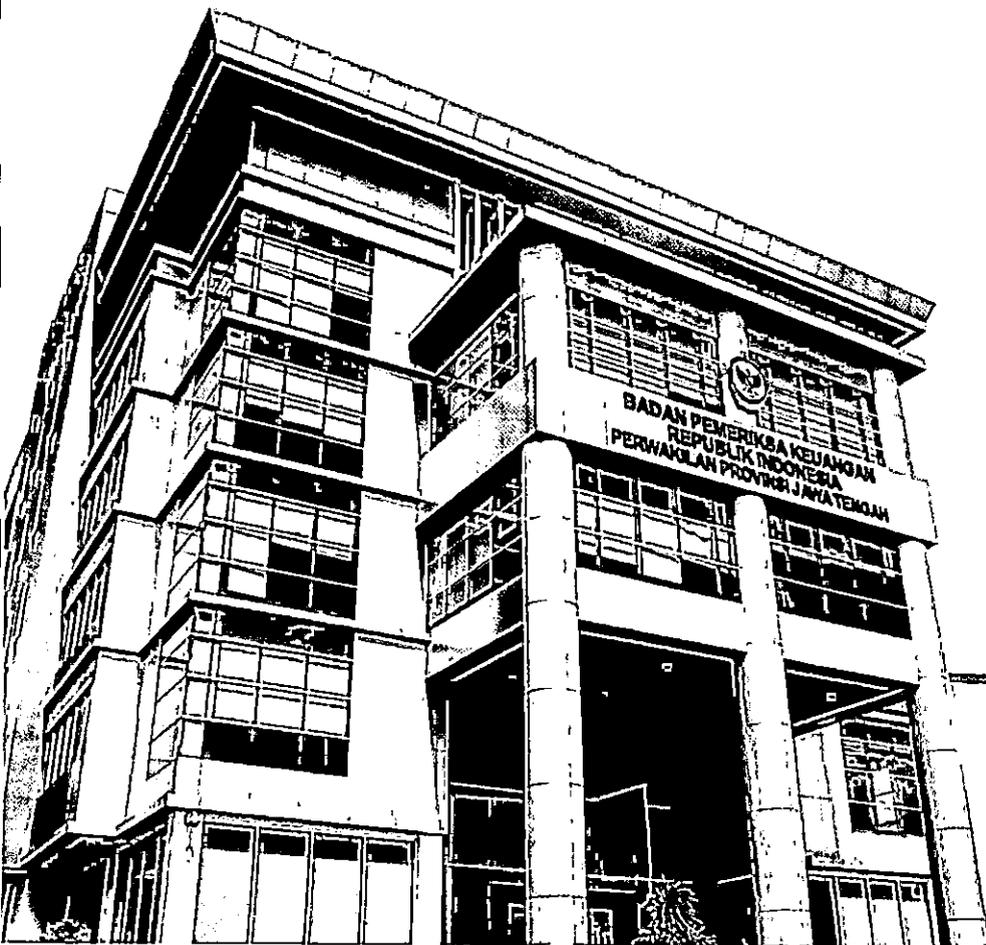




# LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Perwakilan Jawa Tengah pada Tahun 2018 dalam mendukung visi, misi, dan sasaran strategis BPK. Laporan ini merupakan laporan yang menyajikan pencapaian dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan target kerjanya dalam lingkup Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Harus diakui bahwa tingkat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2018 masih belum maksimal, masih terdapat beberapa target yang belum tercapai. Untuk itu diperlukan kerja lebih keras lagi di periode yang akan datang untuk dapat mencapai kinerja maksimal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon saran dan masukan apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini. Namun demikian, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja BPK di masa yang akan datang.

Semarang, Januari 2019  
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah  
Kepala,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hery Subowo'. The signature is stylized and somewhat cursive.

Hery Subowo  
NIP 197105071991031002

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sebagaimana tertuang pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tersebut diperbaharui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja di antaranya adalah Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan Unit kerja mandiri yang ditetapkan. Sedangkan pada lingkungan internal BPK dinyatakan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

### B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

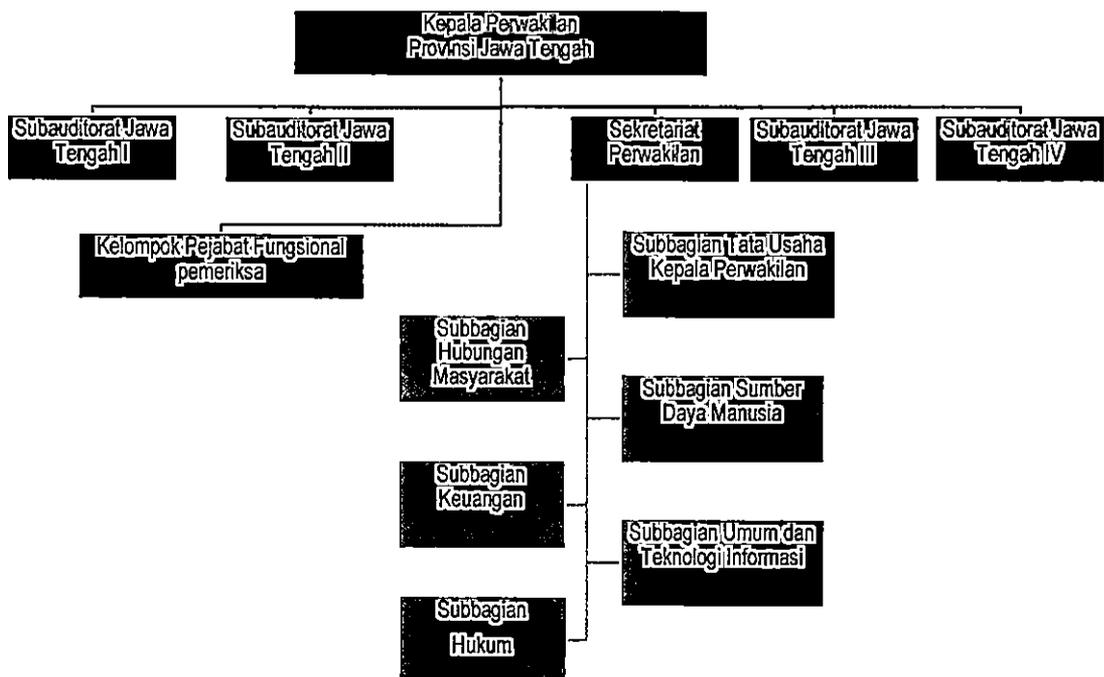
Sesuai Pasal 543 ayat (1) dan (2) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KI-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang kepala. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Departemen Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, khususnya tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi AKN V antara lain dengan merumuskan rencana aksi, kegiatan, dan kebijakan pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah, menyusun program, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menetapkan tim pemeriksa, memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta mengelola sumber daya manusia, keuangan, hukum hubungan masyarakat, teknologi informasi sarana dan prasarana, dan administrasi umum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Perwakilan dan juga mengoperasikan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) untuk memantau kinerja Perwakilan dan memberikan kontribusi serta dukungan pada akuntabilitas kinerja BPK.

### C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KI-XIII.2/9/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK Nomor 3/KI-XIII.2/7/2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

#### **Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III**

1. Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
  - c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
  - d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
  - e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
  - f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
  - g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
  
2. Subauditorat Jawa Tengah I mempunyai tugas:
  - a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
    - 1) merumuskan rencana kegiatan;
    - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
    - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
    - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
    - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
    - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
    - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
    - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
    - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
  - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

3. Subauditorat Jawa Tengah II mempunyai tugas:
  - a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
    - 1) merumuskan rencana kegiatan;
    - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
    - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
    - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
    - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
    - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
    - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
    - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
    - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
  - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
  
4. Subauditorat Jawa Tengah III mempunyai tugas:
  - a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
    - 1) merumuskan rencana kegiatan;
    - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
    - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
    - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
    - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
    - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
    - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
    - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
  - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
5. Subauditorat Jawa Tengah IV mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
    - 1) merumuskan rencana kegiatan;
    - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
    - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
    - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
    - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
    - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
    - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
    - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
    - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
  - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

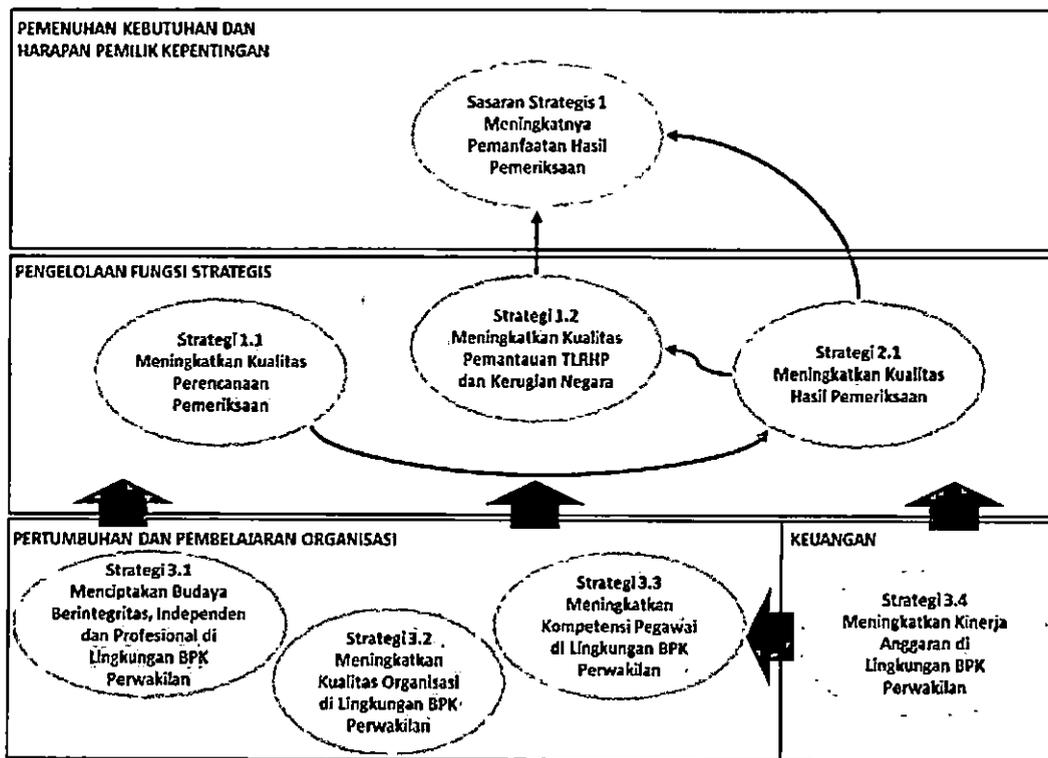
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada akhir bulan Desember 2018 berjumlah 250 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 4 orang Kepala Subauditorat, 6 orang Kepala Subbagian dan 143 orang pejabat fungsional pemeriksa, 65 orang staf penunjang serta 30 orang tenaga kontrak. Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp46.020.609.000,-.

**BAB II  
PERENCANAAN KINERJA  
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat PSMK dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun indikator kinerja dan target kinerja tahun 2018. Indikator kinerja dan target kinerja ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V).

Berikut Peta Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 :

**PETA STRATEGI**



## INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2018

Strategi	Indikator Kinerja		Target 2018	Anggaran
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	70%	Rp. 2.859.310.000,-
	IKU1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	Rp. 1.870.376.000,-
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	Rp. 2.183.233.000,-
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	Rp. 25.723.000,-
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	Rp. 2.559.850.000,-
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	28%	Rp. 5.671.355.000,-
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	Rp. 2.354.161.000,-
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	Rp. 1.708.831.000,-
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	72	Rp. 1.660.265.000,-
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	Rp. 1.106.843.000,-
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	Rp. 5.211.680.000,-
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1	Rp. 2.457.253.000,-
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	Rp. 1.997.421.000,-
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenagkan BPK	100%	Rp. 1.486.325.000,-
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5.0	Rp. 1.672.265.000,-
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5.0	Rp. 1.522.588.000,-
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	Rp. 749.430.000,-
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	Rp. 1.223.233.000,-
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	Rp. 1.432.124.000,-
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	Rp. 929.043.000,-

Strategi	Indikator Kinerja		Target 2018	Anggaran
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	Rp. 839.236.000,-
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	Rp. 588.382.000,-
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	Rp. 1.032.746.000,-
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	Rp. 549.165.000,-
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	Rp. 1.372.911.000,-
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis / Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	Rp. 585.308.000,-
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	Rp. 371.552.000,-
Jumlah IKU	27	Total Anggaran		<b>Rp.46.020.609.000,-</b>

Dari tabel target pencapaian kinerja 2018 diatas dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut :

**SS 1: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**

Sasaran Strategis ini diukur dengan empat Indikator Kinerja Utama yakni IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, dan IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang

**IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pada Tahun 2018 Perwakilan Jawa Tengah menentukan target sebesar 70% penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan.

**IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH**

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat respon dan analisa temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti. Untuk IKU ini Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menentukan target pencapaian sebesar 100%, dengan tujuan setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Auditorat Utama Investigasi untuk dianalisa dan disampaikan ke IPH.

**IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli**

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli. Target pencapaian yang ditentukan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebesar 100%.

**IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang**

IKU ini bertujuan untuk mengukur kontribusi Perwakilan terkait pelaksanaan tugas / kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Target pencapaian yang telah ditentukan sebanyak 1.

**Strategi 1.1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan**

Strategi ini diukur dengan tiga Indikator Kinerja yakni IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan, IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP, dan IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

**IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan**

IK ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK. Untuk IK ini Perwakilan Jawa Tengah menentukan target pencapaian sebesar 90%.

**IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP**

IK ini bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK berupaya meningkatkan peran serta dalam mewujudkan Good Governance yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja. Target pencapaian yang ditentukan untuk IK ini sebesar 28%.

**IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP**

IK ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Target pencapaian yang telah ditentukan untuk IK ini sebesar 80%

**Strategi 1.2 : Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**

Strategi ini diukur dengan tiga Indikator Kinerja yakni IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, dan IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

**IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

IK ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun IHPS. IK ini ditargetkan sebesar 100% pencapaiannya.

**IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara**

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai. Pencapaian IK ini ditargetkan sebanyak 72 laporan.

**IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang**

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara, khususnya melalui SIKAD agar tepat waktu. IK ini ditargetkan sebesar 100% pencapaiannya.

**Strategi 2.1 : Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan**

Strategi ini diukur dengan empat Indikator Kinerja yakni IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan, IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK, IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP dan IK 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang

**IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan**

IK ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP. IK ini ditargetkan sebesar 100% pencapaiannya.

**IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK**

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 4,1.

**IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP**

IK ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas / stakeholder. Pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 100%.

**IK 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang**

IK ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP BPK digugat dan dinyatakan menang berarti menunjukkan LHP yang berkualitas. Pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 100%.

**Strategi 3.1 : Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan**

Strategi ini diukur dengan tiga Indikator Kinerja yakni IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK, IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK dan IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

**IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK**

IK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 5,0.

**IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

IK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Nilai Dasar BPK diterapkan dalam organisasi. Pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 5,0.

**IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin**

IK ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.

**Strategi 3.2 : Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan**

Strategi ini diukur dengan tujuh Indikator Kinerja yakni IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IK 3.2.3 Jumlah Usulan *Best-Practice*, IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice*, IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja, IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan

**IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan**

IK ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menargetkan pencapaian IK ini dengan nilai A.

**IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

IK ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 80%.

**IK 3.2.3 Jumlah Usulan *Best-Practice***

IK ini bertujuan mengukur tingkat penyusunan jumlah *best-practice* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menargetkan pencapaian IK ini sebanyak 1.

**IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice***

Indikator ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja organisasi dalam kerangka *knowledge management*. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.

**IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja**

IK ini bertujuan untuk mendorong unit kerja / satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja Triwulanan, dan Laporan Output secara tepat waktu. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.

**IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana**

IK ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 90%.

**IK 3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan**

IK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa. Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menargetkan pencapaian IK ini sebanyak 3.

**Strategi 3.3 : Meningkatkan Kualitas Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan**

Strategi ini diukur dengan dua Indikator Kinerja yakni IK 3.2.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dan IK 3.2.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

**IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa**

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.

**IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)**

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.

**Strategi 3.4 : Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan**

Strategi ini diukur dengan satu Indikator Kinerja yakni IK 3.3.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan

**IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan**

IK ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 85%.

## RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2018

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2018	Rencana Pencapaian Kinerja				
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>					
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	70%	70%	70%	70%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	0	0	0	1
<b>Strategi 1.1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>					
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	90%	90%	90%	90%
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	28%	0%	0%	0%	28%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	0%	0%	0%	80%
<b>Strategi 1.2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara</b>					
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	0%	50%	50%	100%
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	72	0	36	36	72
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	0%	100%	100%	100%
<b>Strategi 2.1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>					
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	0%	100%	100%	100%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1	0	4,1	4,1	4,1
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	0%	100%	100%	100%
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Strategi 3.1</b>	<b>Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan</b>					
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0	0	0	0	5,0
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	0	0	0	5,0
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Strategi 3.2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan</b>					
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	-	-	-	A
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	80%	80%	80%	80%

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Rencana Pencapaian Kinerja			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
IK 3.2.3	Jumlah <i>best-practice</i> yang disusun	1	0	0	0	1
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>best-practice</i>	100%	0%	0%	0%	100%
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	52%	68%	84%	100%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	90%	90%	90%
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	3	0	1	1	3
<b>Strategi 3.3</b>	<b>Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan</b>					
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	25%	50%	75%	100%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	25%	50%	75%	100%
<b>Strategi 3.4</b>	<b>Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan</b>					
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	30%	50%	70%	85%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 100,14. Berikut adalah rincian pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018 :

**Pencapaian Kinerja Tahun 2018**

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Realisasi 2018	Skor Kinerja
<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>			
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	76,92%	105,00
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100,00
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	104%	104,00
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00
<b>Strategi 1.1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>			
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	105,00
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	28%	28,13%	100,45
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	105,00
<b>Strategi 1.2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara</b>			
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	72	72	100,00
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100,00
<b>Strategi 2.1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>			
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100,00
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,59	105,00
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100,00
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100,00
<b>Strategi 3.1</b>	<b>Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan</b>			
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,00	3,67	73,40
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,68	93,60

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Realisasi 2018	Skor Kinerja
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100,00
<b>Strategi 3.2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan</b>			
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88,89
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	98,88%	105,00
IK 3.2.3	Jumlah <i>best-practice</i> yang disusun	1	1	100,00
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>best-practice</i>	100%	100%	100,00
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100,00
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	91,60%	101,78
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	3	4,10	105,00
<b>Strategi 3.3</b>	<b>Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan</b>			
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	97,20%	97,20
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100,00%	100,00
<b>Strategi 3.4</b>	<b>Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan</b>			
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	85,39%	100,45

Dari tabel di atas dapat diuraikan lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

#### IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Skor IKU 1.1 pada tahun 2018 adalah 105,00, realisasi sebanyak 76,92% tindak lanjut telah sesuai rekomendasi dari target sebesar 70%. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2017 dan tahun 2016, seperti dalam tabel berikut:

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>						
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	105	70%	76,92%	74,83%	74,60%

Peningkatan capaian dari tahun 2016, 2017, dan 2018 ini merupakan hasil dari pelaksanaan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara periodik yaitu per Semesteran dengan mengundang Inspektorat dan pihak-pihak terkait di seluruh entitas Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.



Pembahasan TLRHP Semester II Tahun 2018

**IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH**

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>						
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100	100%	100%	100%	0%

Skor IKU 1.2 tahun 2018 adalah 100, IKU ini merupakan IKU bonus yang berarti apabila tidak terdapat realisasi IKU maka tidak mempengaruhi skor kinerja (skor IKU tetap 100). Pada tahun 2018 belum ada LHP yang mengandung unsur Pidana yang diserahkan ke Auditorat Utama Investigasi.

**IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli**

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dibandingkan dengan Pemenuhan atas Permintaan Penghitungan Kerugian Negara tersebut dan persentase jumlah Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dibandingkan dengan Pemenuhan atas Permintaan Pemberian Keterangan Ahli tersebut. Skor IKU 1.3 tahun 2018 adalah 104, realisasi sebesar 104% dengan target 100%. IKU ini merupakan IKU bonus yang berarti apabila tidak ada realisasi IKU maka tidak mempengaruhi skor IKU. Perwakilan Jawa Tengah tidak menerima Permintaan Penghitungan Kerugian Negara pada tahun 2018, namun hanya menerima 4(empat) Permintaan Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan dan dapat memenuhi permintaan tersebut. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2017 dan tahun 2016, seperti dalam tabel berikut:

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>						
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	104	100%	104%	101%	101%

Peningkatan capaian IKU pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 disebabkan karena jumlah permintaan pemberian keterangan ahli di tahun 2018 lebih dari tahun 2017 dan 2016.



Pemberian Keterangan Ahli oleh Sdr. Arif Julianto

**IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang**

Pendapat BPK RI adalah pendapat yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Pusat/Daerah, DPD, DPRD, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan Lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK RI dapat mencakup antara lain perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>SS 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>						
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	100	1	1	1	1

Dalam tahun 2018 Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyampaikan 1 bahan pendapat yaitu "Duplikasi Tunjangan Kinerja Berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) Kesehatan pada PNS yang Bekerja pada BLUD Khususnya Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah". Pencapaian telah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 1 dengan Skor 100. Capaian ini konsisten dengan capaian tahun 2017 dan 2016.

**IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan**

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>						
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	105	90%	100%	N/A	N/A

Skor IK 1.1.1 pada tahun 2018 adalah 105, realisasi sebesar 100% dengan target sebesar 90%. IK ini merupakan IK baru yang pada tahun – tahun sebelumnya belum ada. Pengukuran atas IK ini adalah membandingkan kesesuaian antara RKP dengan Renstra dan kesesuaian AO dengan TSAO (termutakhir).

**IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP**

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI merupakan rangkaian proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dengan harapan dapat melakukan penilaian secara independen atas aspek ekonomi dan efisiensi operasi serta aspek efektivitas (3E) dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Skor IK ini pada tahun 2018 adalah 100,45, realisasi sebesar 28,13% dengan target 28%. Capaian ini meningkat dari capaian tahun 2017 dan 2016, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>						
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	100,45	28%	28,13%	25%	23,08%

Peningkatan capaian IK ini disebabkan karena jumlah pemeriksaan kinerja di tahun 2018 lebih banyak dari pada tahun 2017 dan 2016. Tahun 2018 Perwakilan Jawa Tengah melaksanakan 18 pemeriksaan kinerja sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 16 dan 2016 sebanyak 15 pemeriksaan kinerja.



Penyerahan LHP Kinerja Tahun 2018

**IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP**

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>						
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	105	80%	100%	N/A	N/A

Skor IK 1.1.3 pada tahun 2018 adalah 105, realisasi sebesar 100% dengan target sebesar 80%. IK ini merupakan IK baru yang pada tahun – tahun sebelumnya belum ada. Pengukuran atas IK ini adalah persentase kesesuaian antara simpulan dengan TSAO.

**IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Keugian Negara</b>						
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%

Skor IK 1.2.1 tahun 2018 adalah 100, realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Data tindak lanjut hasil pemeriksaan dimutakhirkan per Semesteran yaitu Semester I dan II 2018. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2017 dan 2016. Pencapaian tersebut sejalan dengan semangat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan agar rekomendasi yang diperoleh sebagai hasil dari pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secepat mungkin oleh entitas sehingga dapat mengurangi dan memperbaiki permasalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan lapangan.

**IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara**

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Keugian Negara</b>						
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100	72	72	72	72

Skor IK 1.2.2 tahun 2018 adalah 100, realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 72 Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada tahun 2018. Capaian tersebut konsisten dari tahun – tahun sebelumnya, untuk itu akan terus dipertahankan.

**IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang**

Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan oleh Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disampaikan kepada Ditama Binbangkum untuk dikompilasi dan dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI untuk disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD.

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Keugian Negara</b>						
1.2.3	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100	100%	100%	100%	100%

Skor IK 1.2.3 tahun 2018 adalah 100, realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Data penyelesaian kerugian negara/daerah sudah diinput di Aplikasi SIKAD secara tepat waktu. Capaian tersebut konsisten dari tahun – tahun sebelumnya, untuk itu akan terus dipertahankan.

**IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan**

Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan mewujudkan visi BPK RI untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan

bermanfaat, BPK menetapkan sistem perolehan keyakinan mutu yang memadai, yaitu memastikan bahwa pemeriksaan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan dan Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Teknis pemeriksaan.

IK ini difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reuiu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reuiu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>						
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%

Skor IK 2.1.1 tahun 2018 adalah 100, realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Pemeriksaan yang dilakukan adalah 36 pemeriksaan LKPD, 18 pemeriksaan kinerja, dan 10 pemeriksaan DTT semua sudah melalui *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA). Capaian ini konsisten dengan tahun – tahun sebelumnya.



Pengarahan Pra Penugasan Tim Pemeriksaan PDDT

#### IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>						
2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	105	4,1	4,59	4,25	4,58

Skor IK 2.1.2 tahun 2018 adalah 105, realisasi sebesar 4,59 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 4,00.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyebarkan kuesioner *survey* kepuasan kepada 36 Pemerintah Daerah atas kinerja pemeriksa BPK pada pemeriksaan LKPD, Kinerja, dan PDDT. Capaian ini meningkat dari tahun

2017 dan 2016 hal ini menunjukkan bahwa para pemeriksa telah mengimplementasikan nilai – nilai dasar dan kode etik BPK pada saat melaksanakan pemeriksaan.

#### IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Pengukuran IK ini dilakukan atas seluruh jenis pelaksanaan pemeriksaan keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu. Skor IK 2.1.3 tahun 2018 adalah 100, realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa 36 LHP atas LKPD TA 2017, 36 LHP atas Pertanggungjawaban Banparpol, 18 LHP Kinerja dan 10 LHP DTT diserahkan tepat waktu. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2017 dan 2016, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>						
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100	100%	100%	100%	100%



Penyerahan LHP DTT Tahun 2018

#### IK 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>						
2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100	100%	100%	100%	N/A

IK ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP digugat dan dinyatakan kalah akan menunjukkan kualitas LHP yang kurang baik. Atau sebaliknya, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga berarti LHP BPK berkualitas. Skor kinerja IK 2.1.4 pada tahun 2018 adalah 100, realisasi sebesar 100% dengan target sebesar 100%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2017.

**IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK**

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	73,40	5,0	3,67	N/A	N/A

Skor IK 3.1.1 pada tahun 2018 adalah 73,40, realisasi sebesar 3,67 dengan target sebesar 5,0. IK ini merupakan IK baru yang pada tahun – tahun sebelumnya belum ada. Pengukuran atas IK ini yaitu dengan menyebar kuesioner *survey* terkait pemahaman visi, misi dan nilai – nilai dasar BPK kepada semua pegawai melalui pesan elektronik (*e-mail*). Segenap pegawai Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi responden *survey* indeks pemahaman visi, misi dan nilai dasar BPK telah berupaya secara maksimal untuk menjawab dengan pemahaman dan pengetahuan mereka. Akan tetapi masih terdapat jawaban yang belum sesuai dengan penilai dan hal tersebut. Sulit menjadi koreksi bagi kami karena detail penilaian tidak diperoleh. Kami berkomitmen akan memperbaiki capaian IK ini pada periode tahun berikutnya.

**IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	93,60	5,0	4,68	N/A	N/A

Skor IK 3.1.2 pada tahun 2018 adalah 93,60, realisasi sebesar 4,68 dengan target sebesar 5,0. IK ini merupakan IK baru yang pada tahun – tahun sebelumnya belum ada. Pengukuran IK ini satu rangkaian dengan IK 3.1.1 yaitu dengan kuesioner juga. Segenap pegawai Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi responden *survey* indeks implementasi nilai dasar BPK telah berupaya secara maksimal untuk menjawab dengan pemahaman dan pengetahuan mereka. Akan tetapi masih terdapat jawaban yang belum sesuai dengan penilai dan hal tersebut. Sulit menjadi koreksi bagi kami karena detail penilaian tidak diperoleh. Kami berkomitmen akan memperbaiki capaian IK ini pada periode tahun berikutnya.

**IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin**

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100	100%	100%	99,53%	N/A

Skor IK 3.1.3 pada tahun 2018 adalah 100, realisasi sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%. Pengukuran IK ini adalah dengan membandingkan jumlah pegawai yang melanggar kode etik dan peraturan disiplin dengan jumlah semua pegawai. Capaian ini meningkat dari tahun 2017 hal ini dikarenakan pada tahun 2018 tidak terdapat pegawai yang melanggar kode etik dan peraturan disiplin. Kami berkomitmen akan menjaga capaian IK ini pada periode tahun – tahun berikutnya.

**IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan**

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki aktivitas kegiatan yang beragam. Atas hal tersebut, Inspektorat Utama melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah agar output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Skor IK 3.2.1 pada tahun 2018 adalah 88,89 dan mengalami penurunan dari tahun 2017 dan 2016. Pada tahun 2018 Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendapat nilai BB sedangkan pada periode 2017 dan 2016 mendapat nilai A seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	88,89	A	BB	A	A

Penurunan atas capaian IK ini disebabkan karena terdapat beberapa komponen / sub komponen SAKIP yang belum sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi periode tahun sebelumnya. Kita berkomitmen akan meningkatkan capaian IK ini pada periode tahun berikutnya dengan cara berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait sesuai dengan hasil evaluasi dan rekomendasi Itama pada penilaian SAKIP ini.

**IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

IK ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan teknologi dan informasi yang telah disediakan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengukuran IK ini adalah dengan memperhitungkan persentase pemanfaatan beberapa aplikasi diantaranya yaitu : Layanan Dasar (*e-mail*, *e-drive*, dan portal BPK), Layanan Kelembagaan (SISDM), dan Layanan Pemeriksaan (SMP dan SIPTL).

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	105	80%	98,88%	67,51%	79,14%

Skor IK 3.2.2 tahun 2018 adalah sebesar 105, realisasi sebesar 98,88% melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 80%. Capaian ini lebih besar dari tahun 2017 dan 2016. Peningkatan ini disebabkan karena layanan teknologi dan informasi yang tersedia sudah tersinkronisasi dengan baik antara aplikasi yang satu dengan yang lain.

**IK 3.2.3 Jumlah Usulan *Best-Practice***

Best practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi best practice. IK 3.2.3 tahun 2018 memperoleh skor 100, realisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 1 usulan *best-practice*. IK ini merupakan IK yang baru ditargetkan ada realisasinya pada tahun 2018 karena pada tahun – tahun sebelumnya belum ditargetkan untuk terealisasi, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.2.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	100	1	1	N/A	N/A

Perwakilan Jawa Tengah mengusulkan 1 usulan *best-practice* yaitu dengan judul "*Investigative Audit Task Force*". Satgas Audit Investigatif ini merupakan Proyek Perubahan Diklat Pim II Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Hery Subowo. Satgas ini sudah ada di perwakilan sebelum adanya Auditorat Utama Investigasi di BPK, oleh karena itu usulan kami ini dinilai oleh tim penilai usulan *best-practice* masuk kategori *Innovative Practice*.

#### IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice*

*Best-Practice* yang harus diterapkan adalah *Best-Practice* ditetapkan dan telah dilengkapi dengan pedoman pelaksanaannya. Skor IK 3.2.4 tahun 2018 adalah 100, realisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100%. IK ini merupakan IK yang baru ditargetkan ada realisasinya pada tahun 2018 karena pada tahun – tahun sebelumnya belum ditargetkan untuk terealisasi, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	100	100%	100%	N/A	N/A

Pengukuran IK ini adalah setiap Satuan Kerja diharuskan memilih salah satu *best-practice* yang sudah ada untuk direplikasi di satuan kerjanya masing-masing. Perwakilan Jawa Tengah memilih mereplikasi Pemanfaatan Portal BPK sebagai *best-practice* yang diterapkan.

#### IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100	100%	100%	100%	100%

Skor IK 3.2.5 pada tahun adalah 100, realisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2017 dan 2016. Pada tahun 2018 Perwakilan Jawa Tengah telah menyampaikan 1 Laporan Kinerja Tahunan, 3 Laporan Kinerja Triwulanan, dan 12 Laporan Output secara tepat waktu. Kami berkomitmen akan mempertahankan capaian IK ini pada periode tahun – tahun berikutnya.

#### IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan

oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK.

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	101,78	90%	91,60%	91,59%	91,60%

Skor IK 3.2.6 pada tahun 2018 adalah 101,78, realisasi sebesar 91,60% dengan target sebesar 90%. Capaian ini konsisten dari capaian tahun 2016, karena sarana dan prasarana di Perwakilan Jawa Tengah sudah sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.

#### IK 3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

IK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK, memperoleh dukungan dari media masa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media masa. Skor IK 3.2.7 tahun 2018 adalah 105, realisasi sebesar 4,1 dengan target 3. Capaian ini lebih besar dari capaian tahun 2017 tetapi lebih kecil dari capaian tahun 2016, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor	Target	Reallsasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	105	3	4,1	3,1	8,2

Pada tahun 2018 Perwakilan Jawa Tengah melaksanakan 1 media workshop, 2 siaran pers (masing-masing bobot nilai 0,8), 1 media visit, dan 2 *talkshow* (masing-masing bobot nilai 0,5).



Tanya Jawab Setelah Kegiatan Media Workshop

**IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa**

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Pada tahun 2018 IK 3.2.7 mendapat skor 97,20, realisasi sebesar 97,20% dengan target 100%. Capaian ini menurun dari tahun 2016 dan 2017, dapat dilihat dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	97,20	100%	97,20%	97,81%	99,25%

Pemeriksa yang berhasil memenuhi 40JP sebanyak 139 orang dari semua pemeriksa sejumlah 143 orang. Jadi masih terdapat 4 orang pemeriksa yang belum memenuhi 40 JP dengan rincian 2 orang baru mendapatkan 20JP dan 2 orang baru mendapatkan 30JP. Penurunan capaian ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena terdapat pemeriksa yang di perbantukan mengikuti pemeriksaan di satuan kerja lain sehingga tidak dapat mengikuti jadwal pendidikan dan pelatihan yang sudah dijadwalkan Perwakilan Jawa Tengah. Selain itu padatnya jadwal pemeriksaan juga membuat beberapa pemeriksa belum mencapai standar jam pelatihannya. Kita berkomitmen akan meningkatkan capaian IK ini pada periode tahun berikutnya dengan cara berkoordinasi dengan Badiklat PKN BPK RI terkait perencanaan dan pelaksanaan diklat baik di Badiklat maupun di Perwakilan.



Pendidikan dan Pelatihan untuk Pemeriksa

**IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)**

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada satker dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahun 2018 IK ini berhasil mencapai target 100%, dan memperoleh skor 100. Capaian ini meningkat dari tahun 2017 dan 2016, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100	100%	100%	98,68%	93,33%

Sebanyak 77 orang pegawai non pemeriksa berhasil memenuhi minimal jam pelatihan yaitu 20JP. Beban kerja para pegawai non pemeriksa yang lebih rendah dari pemeriksa memudahkan untuk mengatur jadwal pelatihan. Capaian ini akan selalu kami pertahankan pada periode tahun – tahun berikutnya.



Pendidikan dan Pelatihan untuk Pegawai Non Pemeriksa

#### IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Tahun 2018 IK 3.4.1 memperoleh skor 100,45, realisasi sebesar 85,39% sedangkan target sebesar 85%. Namun capaian ini turun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dan 2016, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2018	2017	2016
<b>Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan</b>						
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	100,45	85%	85,39%	88,28%	91,15%

Penurunan capaian ini terjadi karena nilai efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan belum maksimal. Kita berkomitmen akan meningkatkan capaian IK ini pada periode tahun berikutnya terutama nilai efisiensi penggunaan anggaran tersebut.

**B. Realisasi Anggaran**

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp.46.020.609.000,- kemudian direvisi menjadi Rp.45.918.409.000,-. Sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp. 45.024.964.122,- atau 97,88% dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Realisasi (Rp)	Prosentase
1	Januari	1.370.673.641	2,98%
2	Februari	5.332.408.601	11,59%
3	Maret	2.049.956.293	4,45%
4	April	6.339.999.459	13,78%
5	Mei	3.105.540.781	6,75%
6	Juni	2.824.104.532	6,14%
7	Juli	5.041.878.992	10,96%
8	Agustus	2.471.938.893	5,37%
9	September	3.292.012.593	7,15%
10	Oktober	5.060.887.245	11,00%
11	November	3.952.501.126	8,61%
12	Desember	4.183.061.966	9,11%
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp45.024.964.122</b>	<b>97,88%</b>

#### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini merupakan merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar 100,14. Akan tetapi secara detail masih ada beberapa IK pada Tahun 2018 yang belum mencapai target, yaitu: (1) IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK, (2) IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, (3) IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja, dan (4) IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa.

Menindaklanjuti IK yang masih belum sesuai target, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak hentinya melakukan evaluasi dan perbaikan serta berusaha untuk lebih memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga di periode mendatang pencapaian IKU dan IK bisa memenuhi target yang ditetapkan.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ini, dan kami harapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

## Skor Kinerja dari Aplikasi PRISMA

Satuan Kerja **BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**Periode **DES / TW 4 / SEM 2 / TAHUN / 2018**Peta Strategi **Detail Scorecard**

Nama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Score
↳ <b>BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah</b>	Scorecard	Triwulanan				100.14 ●
↳ <b>1 PERSPEKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN</b>	Perspektif	Triwulanan				102.25 ●
↳ <b>55 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>	Sasaran Strategis	Triwulanan				102.25 ●
↳ <b>1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan</b>	IKU	Triwulanan	70,00%	70,00%	76,92 %	105 ●
↳ <b>1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH</b>	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ <b>1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli</b>	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	104,00 %	104 ●
↳ <b>1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang</b>	IKU	Triwulanan	1,00	1,00	1,00	100 ●
↳ <b>2 PERSPEKTIF PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS</b>	Perspektif	Triwulanan				101.51 ●
↳ <b>Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>	Sasaran Strategis	Triwulanan				102.93 ●
↳ <b>Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara</b>	Sasaran Strategis	Triwulanan				100 ●
↳ <b>1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</b>	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ <b>1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara</b>	IKU	Triwulanan	72,00	72,00	72,00	100 ●
↳ <b>1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang</b>	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ <b>Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>	Sasaran Strategis	Triwulanan				101 ●
↳ <b>2.1.1 Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan</b>	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ <b>2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK</b>	IKU	Triwulanan	4,10	4,10	4,59	105 ●
↳ <b>2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP</b>	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ <b>2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK</b>	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ <b>3 PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI</b>	Perspektif	Triwulanan				95.76 ○
↳ <b>Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan</b>	Sasaran Strategis	Triwulanan				87.31 ○
↳ <b>3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK</b>	IKU	Triwulanan	5,00	5,00	3,67	73.4 ●
↳ <b>3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK</b>	IKU	Triwulanan	5,00	5,00	4,68	93.6 ○
↳ <b>3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin</b>	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ○

▼ Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	Sasaran Strategis	Triwulanan					99,34	○
3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	IKU	Triwulanan	A	A	BB		88,89	○
▶ 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulanan	80,00%	80,00%	98,88 %		105	●
3.2.3 Jumlah Best-Practice yang Disusun	IKU	Triwulanan	1,00	1,00	1,00		100	●
3.2.4 Tingkat Penerapan Best Practice	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %		100	●
▶ 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampalan Laporan Output dan Kinerja	IKU	Bulanan	100,00%	100,00%	100,00 %		100	●
▶ 3.2.6 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	IKU	Triwulanan	3,00	3,00	4,10		105	●
▶ 3.2.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	IKU	Triwulanan	90,00%	90,00%	91,60 %		101,78	●
▼ Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	Sasaran Strategis	Triwulanan					98,25	○
▶ 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	97,20 %		97,2	○
▶ 3.3.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa)	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %		100	●
▼ 4 PERSPEKTIF KEUANGAN	Perspektif	Triwulanan					100,45	●
▼ Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	Sasaran Strategis	Triwulanan					100,45	●
▶ 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	IKU	Bulanan	85,00%	85,00%	85,39 %		100,45	●